PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas

Factors For Pushing And Enhancing Implementation Of Policy Center For Control Of Traffic Electronic Violation

Panji Gedhe Prabawa*, Hardi Warsono & Ida Hayu Dwimawanti

Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro, Indonesia

Diterima: 19 Juni 2020 Disetujui: 07 Desember 2020; Dipublish: 31 Januari 2021

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan faktor pendorong dan penghambat serta memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Semarang. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan fenomena implementasi kebijakan seperti: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Semarang pada tahun 2019 belum berjalan dengan baik dan lancar secara keseluruhan. Aspek ini dapat dilihat dari: komunikasi kebijakan belum berjalan dengan baik, pelaksana tidak memahami perintah dan publik minim informasi bagaimana E-Tilang diimplementasikan. Sumber daya kebijakan secara umum telah dilaksanakan meliputi, sumber daya manusia, pendanaan, infrastruktur, sumber daya informasi dan wewenang, namun masih belum maksimal. Aspek disposisi ditunjukkan dengan hubungan petugas yang baik, namun jika dilihat secara umum struktur birokrasi belum dapat mendukung implementasi. Faktor pendorongnya adalah dukungan kepemimpinan, sumber daya yang memadai, kesiapan staf, dan dukungan masyarakat. Faktor penghambatnya adalah perlunya waktu memahami kebijakan, fragmentasi, kesalahpahaman masyarakat dan persepsi yang salah.

Kata Kunci : Kebijakan Public, E-Tilang, Sumber daya

Abstract

This research explains the driving and inhibiting factors and has the aim to describe and analyze the driving and inhibiting factors in implementing E-ticketing policy in Semarang City. This research was prepared using qualitative methods that describe the phenomenon of policy implementation such as: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results showed the implementation of the E-Traffic Policy in Semarang City in 2019 had not been going well and was fast overall. This aspect can be seen from: policy communication is not going well, the implementer does not need approval and the community lacks information on how E-Tilang is implemented. Public policy resources that have been published, human resources, authority, infrastructure, information resources and authority, but still not optimal. Aspects related to good employee relations, do not yet exist in the public bureaucracy do not yet support. The driving factors are leadership support, adequate resources, staff readiness, and community support. The inhibiting factor is the need for time to determine policy, fragmentation, community misunderstanding and wrong perception.

Keywords: Police Policy, E-Traffic Policy, Policy Implementation, Resources

How to Cite: Prabawa, P.G., Warsono, H., & Dwimawanti, I.H. (2021). Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas Di Kota Semarang Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 10 (1): 18-25

*Corresponding author:

E-mail: Pertama@gmail.com

ISSN 2085-0328 (Print)

ISSN 2541-5913 (online)

PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai sebuah lembaga publik menghadapi banyak tuntutan dan perubahan dari masyarakat. Instruksi Presiden dalam Rapat Terbatas Reformasi Hukum pada 11 Oktober 2016 tentang penataan hukum untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas pada lembaga dan kementerian harus dilakukan, tidak terkecuali. Presiden meminta dilakukan pembenahan besar-besaran pada pelayanan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan penindakan pelanggaran (Tilang) agar dipastikan tidak ada lagi praktek pungli. Dengan demikian diharapkan terbentuk kepatuhan hukum dikalangan masyarakat, pembudayaan hukum dan penegakan hukum.

Pelayanan publik menurut Dwiyanto (2006) merupakan pemberian layanan untuk keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan organisasi itu (Sari, 2018). Penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan E-Tilang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka memudahkan masyarakat yang terlibat pelanggaran lalu lintas menggunakan IT (*Infomation Technology*). E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi sehingga seluruh proses tilang akan lebih efisien.

Sistem E-Tilang mulai diberlakukan tahun 2016, dimana program ini berangkat dari banyaknya permasalahan penegakan hukum berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang dipengadilan hingga akutabilitas uang denda. Disatu sisi, tilang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga pemasukkan dari denda tilang masuk pada Kas Negara.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang

melanggar peraturan, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHP dan penjelasannya. Tilang elektronik yang biasa disebut e-Tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

Penerapan e-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 tentang transaksi elektronik dan tentang transaksi elektronik dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Setiyanto, dkk, Setiyanto, dkk (2017), menyebutkan sistem E-Tilang bermanfaat dalam:

- 1) Transparansi. Adanya mekanisme pelaporan dan akses informasi.
- 2) Pemberdayaan. Diharapkan masyarakat dapat mempengaruhi sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan.
- 3) Responsif. Responsivitas akan semakin cepat tanggap terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.
- 4) Keadilan. Dalam layanan E-Tilang setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu

Persoalan yang muncul adalah pada awal penerapan atau implementasi e-tilang adalah belum seluruh pihak terkait memberikan dukungan penuh. Rendahnya angka penggunaan e-tilang dapat pula disebabkan oleh informasi pemahaman sistem E-tilang (Irsan, Jatmiko, & Husin, 2018).

Implementasi kebijakan program E-Tilang di Kota Semarang sempat "melempem" karena kurangnya kerjasama atau koordinasi antar pihak-pihak terkait atau badan pelaksana kebijakan. Permasalahan muncul karena masalah mekanisme penerapan mulai dari kurangnya sosialisasi, denda maksimal, tahapan-tahapan rumit dan target diterapkan. Kemudian infrastruktur

pendukung (titik lokasi pemasangan cctv) dan dasar hukum penindakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus mengikuti mekanisme persidangan untuk memberikan sanksi, sedangkan dalam E-Tilang berdasarkan bukti cctv bisa langsung ditindak. Hal tersebut menjadi kendala penerapan. Menurut Grindle dalam Winarno (2012) berpandangan bahwa implementasi membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan kebijakan terealisasi, "*a policy delivery system*", termasuk diantaranya badan-badan pelaksana kebijakan. Penelitian Sitepu (2019) yang melihat pelaksanaan E-Tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar di Porles Metro Jakarta Selatan menemukan pelaksanaan berjalan baik dalam mencegah pungutan liar dan mempercepat perkara. Kekurangan utama terletak pada sarana dan fasilitas. Temuan Juliandi (2018), mekanisme E-Tilang tidak jauh berbeda dengan manual. Aspek kesalahan server, sarana dan pemahaman masih menjadi aspek kendala. Berbeda dengan penelitian Lutfina dan Nyoman (2019) tentang efektivitas penggunaan E-Tilang di Polres Magelang masih belum tepat. Faktor hambatan terjadi dalam sumber daya manusia, intensitas sosialisasi E-Tilang, mekanisme pelayanan aplikasi e-tilang, sarana dan prasarana. Penelitian DATO (2019) yang melihat penerapan e-tilang di Polres Kota Padang masih belum efektif diterapkan dan menyarankan perlu instrumen hukum dan sosial agar penerapan berjalan baik. Ketiga penelitian tersebut lebih menyortir aspek hukum dari penerapan E-Tilang dan aspek penerapan untuk mengantisipasi pungutan liar. Penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Semarang. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi kebijakan e-tilang di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan (Creswell, 2012) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti pengajuan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan kemudian menganalisis data. Hasil penelitian kualitatif berupa data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Ruang lingkup penelitian merupakan fokus penelitian yang akan diteliti lebih dalam. Hal ini seperti yang dikemukakan Moleong (2005) permasalahan penelitian kualitatif merujuk pada suatu fokus penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah implementasi kebijakan e-Tilang dan faktor-faktor pendorong serta penghambatnya di Kota Semarang Tahun 2019. Subjek penelitian ini dari informan 1 AKBP Yuswanto Ardi, Informan 2 Bripka Sarjiyanto Anggota Prolestabes Semarang, dan Informan 3 Soewoto Bin Soeratman masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan E-Tilang di Kota Semarang Tahun 2019

E-Tilang merupakan suatu kebijakan yang dapat dikatakan relatif baru dari Polri. E-tilang merupakan suatu bentuk inovasi dalam pelayanan publik, terutama bagi masyarakat pelanggar ketentuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat lebih secara efektif dan efisien menyelesaikan administratif pelanggarannya. Implementasi E-Tilang juga merupakan upaya Polri dalam menekan tindak koruptif, khususnya di lingkungan internal dan umumnya di lingkungan masyarakat (publik).

Implementasi E-Tilang di Indonesia dilaksanakan berdasarkan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Surat Tilang Elektronik (E-Tilang). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang ditindak dengan sistem E-Tilang meliputi pelanggaran LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Operasional prosedur E-Tilang dilaksanakan berdasarkan ketentuan operasional prosedur penindakan pelanggaran meliputi operasional prosedur administrasi e-Tilang, penyerahan perkara ke Pengadilan dan operasional prosedur sistem manajemen pusat kendali e-Tilang (*E-Traffic Violation Enforcement Control Center/E-TVECC*) dan *dashboard* e-Tilang (*E-Tilang Information Dashboard/E-TID*). Adapun penindakan pelanggaran LLAJ melalui sistem e-tilang oleh Petugas menggunakan surat tilang elektronik, telepon genggam melalui aplikasi (*smartphone* E-Tilang); dan alat transaksi elektronik perbankan.

Analisis implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Semarang tahun 2019 berdasarkan model Edward III dikemukakan sebagai berikut :

Komunikasi. Komunikasi dari kebijakan E-Tilang dapat dikatakan berjalan belum maksimal. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Petugas pelaksana belum sepenuhnya memahami perintah dan masyarakat minim informasi mengenai implementasi E-Tilang. Komunikasi yang baik akan

membuat implementasi berjalan baik. Kurangnya sosialisasi menjadi permasalahan utama bagi pelaksana.

Adanya dasar hukum dan SOP E-Tilang ternyata tidak diketahui oleh masyarakat dalam pelaksanaan E-Tilang di Kota Semarang. Hal ini terutama terkait dengan besaran denda yang diberlakukan dalam E-Tilang. Menurut Informan 1 AKBP Yuswanto Kasat Lalu lintas Polrestabes Semarang mengungkapkan kebijakan E-Tilang telah disosialisasikan.

"Saya melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota baik secara apel tentang tata cara dan mekanismenya tentang e-tilang itu juga dijelaskan. E-Tilang adalah cara bertindak bawahan, pemahaman umum tujuan E-Tilang untuk menghindari pungli (pungutan liar) dan menciptakan kesan yang mudah bagi pelanggar untuk perkara tilang. Lalu saya tindak lanjuti kepada perwiranya. Sejak awal launching agar memandu anggota di lapangan. Untuk mengejar ada denda tilang karna saat itu belum ada" (Informan 1, Wawancara 17 Februari 2020).

Sosialisasi yang dilakukan petugas tidak sepenuhnya dipahami dan diterima semua elemen masyarakat. Menurut Informan 3 Soewoto Bin Soeratman seorang masyarakat menyebut tidak mengerti tentang prosedur penindakan E-Tilang.

"Saya tidak ada bayangan atau gambaran apa-apa (mengenai e-tilang), Pak. Hanya Datang saja pasrah ikut, tidak tahu prosedurnya sama sekali bagaimana urus tilang (e-tilang) ini." (Informan 3, 5 Februari 2020).

Penyebaran kedua informan, ada hambatan dalam menerima informasi, meskipun telah disosialisasikan dengan baik, tidak semua elemen masyarakat mengetahui dan paham mekanisme E-Tilang. Menurut Kotler (1994: 40) kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya"

(Suryawan, 2015). Masyarakat merasa kebingungan mampu menurunkan kualitas pelayanan.

Sumber Daya Kebijakan. Sumber daya kebijakan dalam implementasi kebijakan E-Tilang di Polrestaes Semarang secara umum telah terpenuhi. Dilihat dari sumber daya manusia (SDM) di Satlantas Polrestaes Semarang, secara kuantitas sudah memenuhi, sedangkan secara kualitas dinilai cukup. Adapun sumber daya anggaran implementasi E-Tilang, sumber daya informasi, sarana prasarana dan wewenang juga telah tercukupi. Menurut Informan 1 AKBP Yuswanto sebagai Pimpinan di Satlantas Polrestaes Semarang menyatakan bahwa Polrestaes Semarang memiliki ketercukupan jumlah personil dalam mengimplementasikan kebijakan E-Tilang. Meskipun terdapat rotasi petugas di Satlantas Polrestaes Semarang, namun jumlah atau kuantitas petugas tidak banyak berubah. Sumber daya manusia pelaksana memiliki kualitas yang baik. Kualitas petugas berupa kecakapan dalam mekanisme prosedur penindakan E-Tilang, namun tidak semua petugas memahami. Proses pengawasan dan adaptasi penggunaan teknologi menjadi kendala utama dihadapi petugas.

“(Petugas) belum maksimal, karena integritas masih perlu di awasi, karena masih ada beberapa oknum yang memanfaatkan peluang pungli (pungutan liar).” (Informan 1, Wawancara 17 Februari 2020)

Kecakapan sumber daya manusia sangat penting karena sebagai pelaksana, ia harus mengetahui apa yang dikerjakannya dan maksimalnya layanan yang diberikan. Menurut Kotler pelayanan adalah kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Pratama, 2015), sehingga SDM menjadi titik penting memberikan layanan.

Disposisi (Kecenderungan) Pelaksana. Disposisi (kecenderungan) yang ditunjukkan oleh Petugas Satlantas Polrestaes Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan e-tilang di Kota Semarang sudah baik. Hal ini ditunjukkan dari respon petugas yang siap melaksanakan perintah dan kemauan untuk mempelajari aplikasi E-Tilang, meskipun mereka memiliki kendala usia dan keterbatasan peralatan. Mutasi petugas menjadi hamatan utama layanan terhambat. Adanya E-Tilang dinilai petugas memberikan kemudahan tugas penindakan. Menurut Informan 3 Briptu Sarjiyanto petugas pelaksana tidak merasa menjadi beban dan memperlambat kinerja mereka dalam menjalankan tugas, melainkan merasa pekerjaannya lebih ringan karena tidak perlu bertanggungjawab mengamankan barang bukti.

“Menurut saya, pelaksanaan e-tilang itu justru mempermudah petugas. Lha kenapa? karena petugas tidak punya tanggungan harus mengamankan barang buktinya dari si pelanggar.” (Informan 2, Wawancara 24 Januari 2020).

Petugas Satlantas Polrestaes Semarang dengan adanya E-Tilang sangat terbantu dalam memberikan layanan terbaik yang ditunjukan dengan merespon baik kebijakan, dan menjalankan perintah berdasarkan prosedur

Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi secara umum belum dapat mendukung pelaksanaan implementasi E-Tilang oleh petugas. Hal ini terlihat dari SOP untuk E-Tilang di Polrestaes Semarang. Meskipun SOP untuk E-Tilang memiliki tahapan yang jelas, tidak sejalan dengan informasi yang dipahami masyarakat. Hal ini justru akan membawa persepsi masyarakat bila pengurusan E-Tilang lebih menyulitkan dari pada tilang konvensional. Sedangkan fragmentasi masih terlihat dalam implementasi kebijakan E-Tilang yang terjadi dilapangan saat terjadi kasus-kasus khusus.

Menurut Informan 2 Bripka Sarjiyanto hambatan atau pertentangan aplikasi E-Tilang di Kota Semarang yang dialami oleh petugas adalah keterbatasan akses pembayaran. Selama ini pembayaran E-Tilang dilakukan oleh bank BRI. Masyarakat tidak seluruhnya memiliki rekening atau ATM bank tersebut sehingga Petugas Satlantas Polrestabes Semarang memerlukan waktu lebih lama dalam penyelesaian E-Tilang.

"Kami harus lebih sabar dalam menunggu melayani pelanggan karena beberapa pelanggan ada yang tidak punya ATM. Sedangkan bank sudah tutup. Nah, mau tidak mau ya harus janji keesokan harinya. Resikonya kami harus menahan barang bukti hingga dia membayar denda dan mengganti struk pembayaran dengan barang bukti." (Informan 2, Wawancara 24 Januari 2020)

Keterkaitan Antar Faktor

Implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Semarang tahun 2019 berdasarkan model Edward III, mulai dari aspek komunikasi, sumber daya kebijakan, sumber birokrasi, dan disposisi. Ada keterkaitan hubungan kebijakan E-Tilang di Kota Semarang diterapkan, seperti pada gambar dibawa.

Sumber: Peneliti, diolah, 2020.

Pertama, transparansi mengenai besaran biaya denda tilang (baik secara E-Tilang maupun Konvensional), belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga membuka peluang bagi oknum petugas dan masyarakat untuk tetap melakukan budaya “negosiasi” dan korupsi. Pelayanan publik sebagai

pemberian layanan mempunyai kepentingan tertentu pada suatu organisasi sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan (Diansari, 2017). *Kedua*, berjalannya implementasi kebijakan E-Tilang didasarkan atas semangat loyalitas dan kepatuhan terhadap atasan sehingga tetap membuat suatu program berjalan atau terlaksana dengan kurang mempertimbangkan efektivitas dan efisiensinya. *Ketiga*, pembebanan biaya implementasi E-Tilang yang seharusnya dibebankan pada anggaran dan biaya Korlantas sesuai dengan Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018 tentang SOP, Penindakan Pelanggaran LLAJ dengan E-Tilang, dilapangan menjadi beban biaya operasional petugas (pulsa/kuota, hape android dengan spesifikasi tertentu). *Keempat*, vonis denda dari Pengadilan terkait E-Tilang, ada beberapa yang tidak sesuai dengan tabel tilang yang ditetapkan. Hal ini membuat Petugas “nombok” atas selisih keputusan tersebut dan kondisi ini menjadi potensi menghambat efektivitas E-Tilang di Kota Semarang.

Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan E-Tilang

Faktor pendorong dalam implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Semarang tahun 2019 adalah : 1) Dukungan Pimpinan untuk terus memotivasi petugas Satlantas Polrestabes Semarang dalam mengimplementasikan e-tilang di wilayah Polrestabes Semarang. 2) Ketercukupan sumber daya (baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana prasarana dan sumber daya informasi) sehingga program E-Tilang dapat dicukupi kebutuhan penunjangnya. 3) Secara umum, Petugas selalu siap menjalankan perintah Pimpinan dengan disiplin dan loyal. 4) Petugas bersedia untuk berusaha memahami kebijakan E-Tilang dengan segala keterbatasannya (umur dan gaktek). 5) Dukungan masyarakat (publik) dalam

hal ini adalah masyarakat Kota Semarang, yang meskipun mengaku belum memahami, namun mereka dapat merasakan kemudahan dengan menggunakan e-tilang.

Faktor penghambat implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Semarang tahun 2019 adalah: 1) Petugas membutuhkan waktu dalam memahami kebijakan e-tilang karena telah terbiasa dengan tilang konvensional. Petugas harus belajar aplikasi dan cara penerapannya. 2) Masih adanya fragmentasi dalam beberapa kasus dimana tidak dapat ter-cover dalam E-Tilang. 3)

Ketidakhahaman masyarakat terhadap tujuan dan prosedur e-tilang yang telah ditetapkan. 4) Perbedaan persepsi masyarakat terhadap implementasi e-tilang, dimana masyarakat mempersepsikan ribet dan denda maksimal karena ketidakhahaman mereka. 5) Masih adanya oknum yang mengarahkan tilang konvensional daripada tilang elektronik.

Secara sederhana, faktor pendorong dan penghambat Implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Semarang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi E-Tilang di Kota Semarang

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Dukungan Pimpinan	Petugas butuh waktu memahami
Kecukupan sumber daya (SDM, anggaran, sarpras, informasi)	Masih adanya fragmentasi dalam beberapa kasus
Respon Petugas Jalankan Perintah	Ketidakhahaman Masyarakat
Upaya Pemahaman Petugas	Perbedaan Persepsi Masyarakat
Dukungan Masyarakat atas kemudahan e-tilang.	Masih adanya oknum yang mengarahkan tilang konvensional.

Sumber: Peneliti, diolah, 2020

Secara umum faktor kendala lebih kepada persoalan mekanisme pelaksana dan SDM. Berbeda dari temuan Perdani dkk (2018) di Kabupaten Banyumas, yang lebih kepada teknis dan regulasi. Menurut Wibowo (2016), E-Tilang proses tilang secara digital yang memanfaatkan kemajuan teknologi yang mendatangkan efisiensi dalam manajemen administrasi (Rakhmadani, 2017).

SIMPULAN

Implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Semarang Tahun 2019 secara prosedur, E-Tilang harus menggunakan surat tilang elektronik, sistem android dan alat transaksi elektronik perbankan. Keseluruhan sistem dan mekanisme E-Tilang terintegrasi dan berinteraksi dengan sistem informasi dan komunikasi E-Tilang (*E-Traffic Violation Enforcement Control Center/E-Tvecc*). Meski telah terintegrasi dan berinteraksi, implementasi E-Tilang di Kota Semarang belum berjalan dengan baik

secara keseluruhan seperti yang diharapkan oleh pemegang kebijakan (Polrestabes Semarang).

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan E-Tilang di Kota Semarang tahun 2019: *pertama*, Petugas membutuhkan waktu dalam memahami kebijakan E-Tilang karena telah terbiasa dengan tilang konvensional. Masih adanya fragmentasi dalam beberapa kasus dimana tidak dapat ter-cover dalam E-Tilang. *Kedua*, sosialisasi yang disampaikan tidak berjalan baik dan menimbulkan perbedaan persepsi masyarakat terhadap implementasi E-Tilang, dimana masyarakat mempersepsikan proses rumit dan denda maksimal. Ketidakhahaman masyarakat terhadap tujuan dan prosedur E-Tilang yang telah ditetapkan. Masih adanya oknum yang mengarahkan tilang konvensional daripada tilang elektronik.

Adapun faktor pendorong dalam implementasi kebijakan E-Tilang: *pertama*, Dukungan pimpinan untuk terus

memotivasi petugas. *Kedua*, ketercukupan sumber daya (baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana prasarana dan sumber daya informasi). *Ketiga*, petugas selalu siap menjalankan perintah dan berusaha memahami kebijakan E-Tilang dengan segala keterbatasannya (umur dan gaptek). Dukungan masyarakat (publik) dalam hal ini adalah masyarakat Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, L. Z. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi keti)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dato, M. F. R. (2019). Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Padang. Universitas Andalas.
- Diansari, Mi. (2017). Analisis Kualitas Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Motor (SIM C) di Polres Semarang 2016. *E-Jurnal3.Undip.Ac.Id, (Sim C)*, 1-14. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publication-s/90389-ID-analisis-kualitas-pelayanan-surat-ijin-m.pdf>
- Irsan, Y. M., Jatmiko, G., & Husin, B. R. (2018). Perspektif Penerapan E-Tilang dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television): Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung. *Jurnal Poenale*, 6(4), 1-14.
- Juliandi. (2018). Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Mataram) (Mataram). Retrieved from <http://eprints.unram.ac.id/9712/>
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Perdani, D., Puspita, Y., & Hendriana, R. (2018). Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Kabupaten Banyumas. *Administrasi Publik*, 2(1), 93-102.
- Pratama, M. H. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 90-98.
- Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 7(3), 663-671.
- Sari, W. H. (2018). Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Oleh Polresta Pekanbaru (Studi kasus SIM Keliling. *Jurnal JOM UNRI*, 5(3), 1-13. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 754-766. Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2293>
- Sitepu, C. (2019). Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan). *Jurnal.Fh.Unila.Ac.Id*.
- Suryawan, D. K. (2015). Kualitas Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan C. *Majalan Ilmiah "Dian Ilmu"*, 15(1), 58-74.
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 tentang transaksi elektronik.
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas dan Angkutan Jalan.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: C A P S.